BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya ialah kumpulan alat yang digunakan oleh suatu lembaga otoritas yang akan difungsikan untuk mengatur bagaimana warga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum sebagai *a tool of social control* harus mampu mencocokkan dengan perkembangan zaman. Di dalam uraian ini, aspek-aspek hukum melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online sangat penting, khususnya hak konsumen.¹

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangatlah lemah. Karena posisi konsumen yang lemah, sehingga hak-hak konsumen sangat berbahaya untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, konsumen harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum ialah memberikan perlindungan (pengayoman) terhadap masyarakat.²

Sebagian besar konsumen sangat cepat terpesona oleh harga yang murah dan hasil yang maksimal dari produk yang di tawarkan. Pesatnya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, serta perkembangan ekonomi sudah menyebabkan perubahan yang cepat pada peralatan kesehatan, obat-obatan, dan obat-obatan asli Indonesia, sehingga mendorong lahirnya berbagai sektor baru, khususnya industri produk kecantikan baru.³

¹ Azis, R.A., 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online**, *Lex Journalica*, Volume 15 Nomor 2, hlm. 2.

² Ibid.

³ Putra, S., 2014, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Ecommerce**, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 4, No. 2, hlm. 5.

Selain melayani tujuan estetika, kosmetik juga membantu dalam perawatan serta penyembuhan kulit. Meskipun tidak merupakan kebutuhan vital, kosmetik ialah salah satu barang yang sering digunakan bagi masyarakat. Dengan demikian, keamanan kosmetik dari bahan yang berbahaya harus dipertimbangkan. Produk-produk kosmetik yang berbahaya biasanya tidak mempunyai izin beredar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian, produk yang ilegal biasanya di jual dengan harga murah.⁴

Menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 suatu produk kosmetik yang di edarkan wajib memenuhi standard dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi.⁵ Artinya suatu produk kosmetik dapat dikatakan ilegal apabila diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk tersebut, karena mengandung bahan berbahaya, dan merugikan perekonomian negara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8a UU No. 8 Tahun 1999 "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (*das sollen*).” Pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku komersial menawarkan kosmetik yang mengandung zat berbahaya dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan serta memperoleh dana untuk

⁴ Fitriyani, A. 2018. **Tingkat Pengetahuan Dan Persepsi Bahasa Kosmetik Yang Mengandung Pemutih di SMK Muhammadiyah Lebaksiu.** *perpustakaan.poltektegal.ac.id.*

⁵ Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

menunjang kebutuhannya. Terkait kosmetik tidak aman yang mereka perdagangkan, pelaku perusahaan tidak memberikan informasi yang akurat serta tidak memperhatikan hukum terkait. Salah satunya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar menemukan ratusan kemasan kosmetik mengandung bahan berbahaya dijual bebas di Kota Denpasar. Krim wajah, krim pemutih, dan barang-barang lain yang sering dipakai wanita setiap hari termasuk di antara kosmetik ilegal tersebut. BBPOM meminta setiap orang di lingkungan untuk segera melaporkan kosmetik yang dicurigai ataupun tidak resmi ke organisasi.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar mengamankan 247 produk kosmetik yang tidak melengkapi ketentuan, tanpa izin edar, atau mengandung bahan berbahaya yang dijual di Kota Denpasar. Jumlah produk kosmetik yang diamankan pihak Balai Besar POM di Denpasar itu mencapai 10.751 kemasan dengan nilai ekonomi ditaksir Rp 2,097 miliar lebih.⁶

Kosmetik yang mereka tawarkan seringkali mengandung zat dalam takaran yang melebihi batas yang diperbolehkan. Wanita saat ini lebih memilih untuk menggunakan barang-barang yang siap pakai, seperti krim pemutih, yang dapat digunakan untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan bintik-bintik gelap pada wajah terlepas dari bahan produk tersebut. Dari merek krim pemutih yang paling mahal hingga yang paling murah dijual oleh para pelaku bisnis tanpa izin BPOM.

Wanita menggunakan kosmetik secara teratur untuk meningkatkan atau merawat penampilan mereka. Kosmetik adalah zat yang siap diaplikasikan di luar

⁶ Silaban, M.W, 2019, **BBPOM Denpasar Musnahkan Ribuan Obat dan Kosmetik Ilegal**. URL : <https://bisnis.tempo.co/read/1203720/bbpom-denpasar-musnahkan-ribuan-obat-dan-kosmetik-ilegal> . Diakses tanggal 22 Juli 2024.

tubuh, seperti untuk rambut, wajah, dan kuku, serta bisa mempercantik penampilan agar lebih menarik, menurut BPOM.⁷

Peran pemerintah dengan mencegah pelanggaran hukum seperti penjualan kosmetik ilegal yang belum memenuhi persyaratan dan tidak memiliki izin. UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (berikutnya disebut UUPK) mencantumkan dalam pasal 8 bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁸

Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Kosumen menyatakan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Karena diyakini bisa mendukung dan memajukan kepentingan konsumen, maka UU perlindungan konsumen dianggap memberikan perlindungan hukum dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, banyak perempuan membeli produk mereka secara berbeda, terlepas dari dampak produk, bahkan jika mereka tidak terdaftar di BPOM, karena kosmetik yang mereka beli belum memenuhi aturan atau persyaratan tertentu. Kosmetik ini mudah didapat dengan harga murah sebab belum memiliki nomor izin edar BPOM, tanggal kadaluarsa produk, atau label bahan kosmetik.⁹

⁷ Saraswati, G., & Dewi, A.A.I.A.A., 2019, **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya**, Kertha Negara : *Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], V. 7, N. 5, hlm. 1-16.

⁸ Dewi Muliawan dan Neti Suriana, 2018, **A-Z Tentang Kosmetik**. Jakarta: Gramedia, hlm. 9.

⁹ Isnaini. E., 2019, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya**, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Vol. 6 No.1, hlm. 6.

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Dalam rangka mematuhi peraturan yang merugikan konsumen, kata “perlindungan konsumen” mengacu pada perlindungan hukum yang ditawarkan pada konsumen. Perlindungan hukum ialah upaya penting guna menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Hukum pidana cenderung menjadi sasaran perilaku jahat para pelaku ekonomi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak boleh melakukan apa pun yang merugikan konsumen.

Lini depan perlindungan konsumen adalah BPOM. Selain itu, BPOM sangat penting untuk memenuhi Agenda Prioritas Pembangunan (*Nawa Cita*) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar global sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama di bidang kesehatan. Dengan demikian, BPOM selaku lembaga pengawas obat serta makanan perlu untuk diperkuat. Berdasarkan hasil pengawasan badan BPOM kota Denpasar, diketahui bahwa masih banyak sarana produksi kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan BPOM Kota Denpasar. Berikut disajikan pada tabel 1.1 Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2021 – 2023.

Tabel 1.1
Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi
Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Saranan	Memproduksi Kosmetik Tanpa Izin	Belum menerapkan Aspek CPKB secara konsisten
2021	75	17	57
2022	113	33	80
2023	60	21	37

Sumber: BPOM Kota Denpasar, 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan BPOM Kota Denpasar, diketahui penindakan terhadap produsen yang memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin beredar pada tahun 2022 mengalami peningkatan.¹⁰ Peredaran kosmetik merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan memindah tangankan, menyebarluaskan kosmetika, yang memiliki hak melaksanakan peredaran kosmetik ialah individu tertentu yang sudah mempunyai izin serta bagi mereka yang menyalurkan kosmetik *illegal* tanpa adanya izin berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dinyatakan "telah melakukan tindak pidana, ancamannya berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah)."

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 "pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Menurut pasal diatas bahwa pelaku usaha yang telah mengindahkan pasal-pasal yang disebutkan bisa dikenakan pidana dan hal ini berpengaruh terhadap pasal 204 dan 205 KUHPidana "yaitu aspek norma dan pengaruh dari aspek ketentuan pidana, kemudian cakupan akan pasal 204 dan 205 KUHPidana yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengancam pidana

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 49.

terhadap perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan.”¹¹

Dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap fenomena merebaknya kosmetik ilegal, upaya perlindungan konsumen yang belum optimal dan keleluasaan pelaku untuk membuat obat dalam bentuk kosmetik tanpa izin tetap akan meningkat, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Denpasar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal adanya peredaran produk kosmetik yang tidak mendapatkan syarat ijin edar di Kota Denpasar?
2. Apakah yang menjadi kendala BPOM Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar bisa mempertajam analisis pembahasan dari penelitian, diperlukan uraian pembahasan dalam ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah yang diangkat penulis diantaranya:

1. Pada pembahasan dari rumusan masalah pertama menitikberatkan pada

¹¹ Dewi, Anak Agung I.A.A., 2019, **Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya**. *Jurnal Kertha Negara*, 7 (5). ISSN 2303-0585.

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal adanya peredaran produk kosmetik yang tidak mendapatkan syarat izin edar di kota Denpasar.

2. Pada pembahasan dari rumusan masalah kedua menitikberatkan pada kendala BPOM Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap konsumen kosmetik ilegal di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal adanya peredaran produk kosmetik yang tidak mendapatkan syarat izin edar di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui kendala BPOM Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang

telah ditentukan.¹² Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.¹⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tindakan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

¹² Arikunto, Suharsimi, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126-127.

¹³ Soekanto, Soerjono, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

¹⁴ Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

sebagaimana adanya terkait dengan kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar.

1.5.3 Data Dan Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu staff Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Denpasar, untuk mencari data berkaitan dengan kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁶ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25.

Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Data Tersier

Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara/*interview* yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan¹⁸. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Teknik Wawancara yaitu dengan mempergunakan teknik wawancara/*interview* yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan staff Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Denpasar, untuk mencari data berkaitan dengan kasus peredaran

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

kosmetik ilegal di Kota Denpasar. Dengan teknik yang demikian itu akan dimungkinkan untuk memperoleh data-data yang valid, yang dapat diuji dan diakui kebenarannya. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁹

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Adapun metode analisis data yang yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif bentuk deduksi di mana dilakukan dengan melalui proses derivasi dengan menyimpulkan dalil-dalil khusus. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dan perjanjian sebagai pernyataan umum untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal khusus.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Waluyo, Bambang, 1996, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:²¹

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Kajian Pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Konsumen, Unsur-unsur Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Kosmetik dan Pengertian Kosmetik Ilegal.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL ADANYA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA DENPASAR

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai

²¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Denpasar: Unmas, hlm. 48.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Yang Tidak Memperoleh Ijin Edar Dari BBPOM Di Kota Denpasar, kedua yaitu mengenai Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar.

BAB IV HAMBATAN BBPOM KOTA DENPASAR DALAM PENGAWASAN TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA DENPASAR

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Faktor-faktor Penyebab Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar, kedua yaitu mengenai Hambatan BBPOM Dalam Pengawasan Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Denpasar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.